

BAB I

PENGANTAR

Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum dan memberiperlindungan dari keadaan bahaya atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Polisi dalam peranannya memelihara keamanan dan ketertiban memiliki dimensi yang luas dan tidak dapat diukur karena tugas polisi begitu kompleks mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Pola tugas kepolisian pun terus dikembangkan, sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat lain. Maka dari itu, seorang polisi diharapkan memiliki profesionalisme dan mental yang baik dan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya untuk dapat mengantisipasi dan menghadapi tantangan tindak kriminal dan beragam tugas kepolisian lainnya (Wibisono, 2015).

Dalam undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 1, diatur tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ada dua aturan yang menjelaskan 1) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sutanto (2003) mengemukakan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia (Polri)

dibagi dalam lima fungsi teknis operasional yaitu fungsi teknis sabhara, fungsi teknis lalu lintas, fungsi teknis reserse, fungsi teknis intelijen keamanan serta fungsi teknis bimbingan masyarakat. Selanjutnya Wasono (2004) mengemukakan bahwa fungsi reserse lebih cenderung kepada tindakan refresif yaitu tindakan pemberantasan kejahatan, sedangkan fungsi teknis sabhara lebih cenderung kepada tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan terjadinya kejahatan. Fungsi teknis lalu lintas meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, pengkajian masalah lalu lintas, serta patroli jalan raya yang bersifat antar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Fungsi teknis bimbingan masyarakat bertugas mensosialisasikan informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dengan masyarakat. Fungsi teknis intelijen keamanan bertugas untuk memperoleh informasi, mengembangkan obyek atau aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelijen keamanan dapat dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup.

Polisi merupakan suatu profesi yang sangat rumit dengan pekerjaan yang sangat kompleks sehingga menyebabkan tidak ada waktu santai, karena kasus datang susul menyusul. Polisi diharapkan memiliki kesiapan akan tantangan dalam pekerjaan serta tahan terhadap tekanan dari dalam institusi kepolisian sendiri maupun tekanan yang berasal dari luar institusi. Hal ini dibenarkan oleh Ajun Komisaris Polisi Muhtar yang bekerja pada bagian Sumber Daya Manusia Polda DIY melalui wawancara awal peneliti pada tanggal 21 Maret 2016

mengatakan bahwa terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang pada anggota polisi terutama dalam penyalahgunaan wewenang. Tindakan-tindakan seperti pungutan liar, asusila, narkoba, miras, dan penembakan serta bunuh diri merupakan gambaran fenomena polisi yang mengalami stres kerja. Selain itu, pekerjaan polisi penuh dengan resiko berbahaya. Bahaya tersebut tidak selalu dapat diantisipasi oleh setiap anggota, tetapi dapat muncul tiba-tiba. Hal ini menyebabkan polisi harus senantiasa siap dan waspada dalam keadaan apapun sehingga beberapa anggota merasa khawatir terhadap keselamatannya dalam bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut tidak jarang membuat polisi harus melaksanakan tugas dengan target yang cukup berat. Namun meskipun sudah bekerja keras, di sisi gaji yang diterima cukup kecil dibandingkan dengan tingginya kebutuhan hidup terlebih untuk anggota yang sudah berkeluarga.

Kenyataan yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Polisi yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat pada kenyataannya tidak selalu menunjukkan sikap yang semestinya, sehingga hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Banyak ditemukan perilaku polisi yang menyimpang dan menurunkan citra polisi di mata masyarakat, seperti yang diberitakan mengenai kasus Brigadir Petrus Bakus yang membunuh dan memutilasi dua anak kandungnya. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi kondisi kejiwaan seorang polisi. Hal ini terjadi terutama pada anggota di tingkatan bawah gajinya terbatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara, beban pekerjaan menuntut mereka siaga 24 jam untuk melayani masyarakat. Hal ini diakui

olehkepala divisihumas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan menyatakan bahwa banyak anggota polisi yang mengalami stres akibat beban kerja. (dilansir oleh Kompas.com, Selasa 15/03/2016 pukul 07:11 WIB).

Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) merupakan bagian terpenting dari fungsi Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Suryana, 2013). Dalam hal ini salah satu tugas intelijen keamanan adalah dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalitas yang sangat marak terjadi dalam masyarakat. Karwita dan Saronto (dalam Suryana, 2013) mengemukakan empat peran yang diemban oleh Intelkam yaitu: (1) Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri; (2) Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal pimpinan atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman/gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan; (3) Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku

serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.

Hasil wawancara dengan Wahyudi (Anggota Intelkam) pada tanggal 13 Februari 2017 mengungkapkan Secara fisik dan mental polisi fungsi Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) terjun langsung di tengah-tengah masyarakat baik itu secara terang-terangan maupun dalam penyamaran dan hal demikian berhubungan langsung dengan masyarakat baik-baik maupun dengan penjahat. Beberapa alasan yang dapat mengakibatkan polisi Intelkam di bawah bayang-bayang stres : 1) Polisi intelkam bekerja dalam jalur komando, hal ini dapat membuatnya tidak dapat bekerja dengan santai. 2) resiko bahaya sehingga harus senantiasa siaga atau waspada. 3) Informasi yang dikumpulkan dilapangan harus benar-benar valid sehingga tidak salah sasaran yang berakibat pada salahnya penangkapan.

Menurut Amrullah (1999), polisi yang berada di level bawah dan di lapangan memang cenderung mengalami stres kerja yang lebih berat dibandingkan di ruangan (kantor). Hal ini disebabkan karena beban kerja yang terlalu banyak (*over load*), jarang dilakukan rotasi atau pergantian. Selain itu, polisi lapangan secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka setiap hari langsung menangani masalah kejahatan di masyarakat. Kalau kerjanya tidak memuaskan, maka merekalah yang akan mendapat celaan dan cacian dari masyarakat.

Stres kerja merupakan ancaman bagi sebuah organisasi yang dapat berdampak negatif bagi individu atau organisasi. Menurut Sukadiyanto (2010)

stres kerja merupakan suatu tekanan atau suatu perasaan yang menekan dalam diri seseorang. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan yang diinginkan oleh individu. McGrath (Sukadiyanto, 2010) menyatakan bahwa stres akan muncul pada individu apabila terdapat ketidakseimbangan atau kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani atau rohani.

Tekanan yang dihadapi seorang polisi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat memicu timbulnya stres kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Zakir dan Murat (2011) bahwa menjadi seorang polisi dianggap sebagai pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi, hal ini dikarenakan jam kerja yang panjang, struktur kepemimpinan dan kekhawatiran akan keselamatan. Menurut Gul (dalam Zakir dan Murat, 2011) mengatakan stres kerja mungkin tidak hanya memiliki efek yang buruk bagi dirinya sendiri namun pada sesama petugas yang lain bahkan keluarga.

Dampak stres kerja pada polisi dijelaskan oleh Morash dan Haarr (dalam Morash, Haarr, dan Kwak, 2006) anggota polisi yang memiliki tingkat stres kerja yang tinggi mengalami masalah psikologis dan fisik yang tinggi. Pada umumnya mereka mengalami gangguan kesehatan, sering absen dari pekerjaan, mengalami *burnout*, dan tidak puas terhadap pekerjaan mereka. Ketika individu mengalami stres kerja, mereka mengalami stres kronis, depresi, gangguan pencernaan, gangguan jantung, penggunaan atau penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, terjadi perceraian bahkan usaha bunuh diri.

Robbin dan Judge (2008) menyebutkan salah satu faktor penyebab timbulnya stres kerja adalah beban pekerjaan yang berlebihan. Polisi dituntut untuk cepat, tepat dan akurat dalam menangani berbagai tugas sehingga dapat menimbulkan rasa tertekan dan akan sangat berpengaruh besar terhadap tindakan dan perilaku yang dimunculkan dalam organisasi. Ketidakmampuan petugas dalam menjawab tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh institusi kepolisian dapat menjadi pemicu timbulnya stres. Tuntutan tersebut mencakup beban kerja, kerja malam dan resiko dan bahaya dalam menjalankan tugas.

Menurut Meshkati (dalam Tarwaka, 2015) beban kerja adalah suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebih. Pekerjaan polisi khususnya pada fungsi teknis Intelijen Keamanan (Intelkam) dalam hal ini dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, serta dituntut untuk cepat dan tanggap mengatasi segala permasalahan di masyarakat, sedangkan waktu yang diberikan sangat singkat jarang dilakukan rotasi atau pergantian. Selain itu, polisi fungsi intelkam merupakan polisi yang melaksanakan tugas di lapangan secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka setiap hari langsung menangani masalah kejahatan di masyarakat. Hal

didukung oleh pernyataan dari pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (detikcom, 15/03/2007) menurutnya polisi memiliki tingkat stres yang tinggi, beban kerja yang berlebihan dan belum ditambah beban mereka untuk menghidupi keluarganya. Bahkan tugas yang berat ini sering mengundang bahaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada hubungan antara beban kerja dan stres kerja pada anggota polisi unit Direktorat Intelijen Keamanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?. Berdasarkan perumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Antara Beban Kerja dan Stres Kerja Pada Anggota Dit Intelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dan stres kerja pada anggota Dit Intelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pengembangan disiplin ilmu pengetahuan psikologi di bidang industri dan organisasi, dan menambah wawasan dalam manajemen sumber daya manusia. Disamping itu, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang stres kerja maupun beban kerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada institusi kepolisian bahwa stresor yang dapat memicu stres kerja dalam institusi kepolisian dapat berasal dari beban kerja sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam institusi kepolisian untuk memahami penyebab terjadinya stres kerja, sehingga mampu meningkatkan semangat anggota dalam bekerja dan untuk kepentingan bersama.

Keaslian Penelitian

Penelitian stres kerja selama ini sudah banyak diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian :

1. Nurrani (2009) dengan judul “Hubungan antara Beban Kerja Mental Dengan Stres Kerja pada Perawat”. Pada penelitian sebelumnya adanya kesamaan pada variabel bebas yaitu beban kerja dan variabel tergantung yaitu stres kerja, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan subjek anggota polisi. Populasi dalam penelitian sebelumnya adalah perawat di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro yang berjumlah 62 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara beban kerja mental dengan stres kerja. Hubungan tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) = 0,720, dengan $p = 0,000$. Berdasarkan data tersebut, maka hipotesis penelitian ini diterima.

2. Effendi (2011) dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Stres Kerja terhadap Karyawan Bagian Produksi PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan”. Pada penelitian tersebut adanya kesamaan variabel yaitu stres kerja. Populasi dalam penelitian sebelumnya adalah karyawan bagian produksi PT Pertamina Refinery Unit V sebanyak 90 orang karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan stres kerja. Hubungan tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) = 0,917, dengan p = 0,000. Berdasarkan data tersebut, maka hipotesis penelitian ini diterima.
3. Martadinata (2009) dengan judul “Stres Kerja Ditinjau dari Shift Kerja pada Perawat Rumah Sakit Umum Kota Sawahlunto”. Dari penelitian tersebut adanya kesamaan pada variabel stres kerja namun peneliti tidak meneliti dari tinjauan shift kerja namun dari beban kerja. Populasi dalam penelitian sebelumnya adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto, Padang Sumatra Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan stres kerja dengan shift kerja malam. Uji independent sample t test yang telah dilakukan, di peroleh nilai t = -0,695 dan nilai p = 0,498 ($p > 0,05$). Jadi hipotesis yang diajukan ditolak.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat dilihat keasliannya berdasarkan hal-hal berikut antara lain:

1. Keaslian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan mengacu pada teori penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengacu teori aspek-aspek stres kerja dari Robbins dan Judge (2008) dan teori aspek-aspek beban kerja dari Tarwaka (2015).

2. Keaslian Alat Ukur

Terdapat dua alat ukur yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala stres kerja dan skala beban kerja. Alat ukur untuk variabel stres kerja menggunakan skala yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek dari Robbins dan Judge (2008). Alat ukur beban kerja menggunakan skala yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek Tarwaka (2015).

3. Keaslian Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan digunakan peneliti adalah anggota polisi yang bekerja di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta baik itu perempuan maupun laki-laki yang telah bekerja minimal 2 tahun, di mana anggota polisi telah beradaptasi dengan baik pada organisasi, dan berada di Yogyakarta.